



KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT  
JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# Pelayanan Publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK



Oleh:  
**Heru Setiawan, S.E., M.Si.**  
**Kepala Biro Humas dan Protokol**



## **VISI & MISI**

### **MAHKAMAH KONSTITUSI**

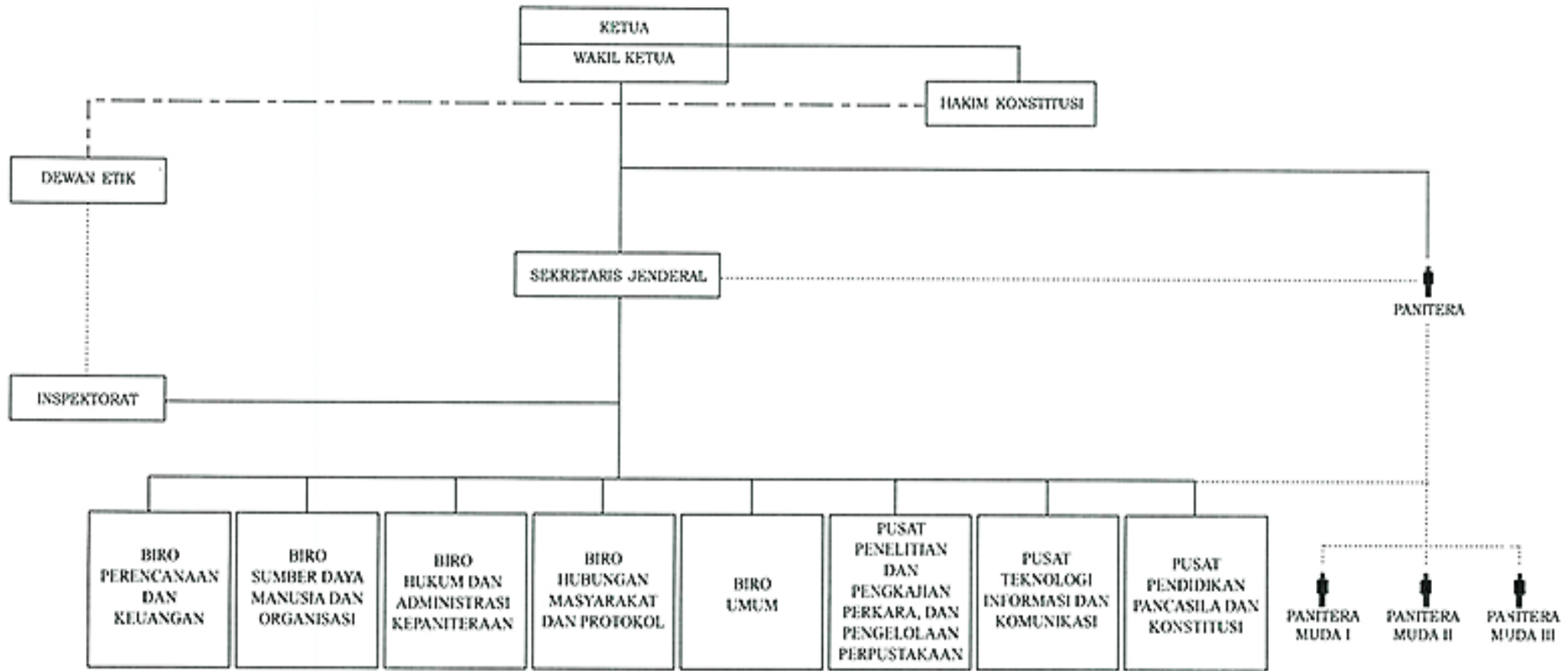
#### **VISI**

Mengawal Tegaknya  
Konstitusi Melalui  
Peradilan Modern dan  
Terpercaya

#### **MISI**

- 1) Membangun Sistem Peradilan Konstitusi yang Mampu Mendukung Penegakan Konstitusi
- 2) Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara

# STRUKTUR ORGANISASI MAHKAMAH KONSTITUSI



# MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK



## MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA.

MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS. BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2018  
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

**M. GUNTUR HAMZAH**



# **PERSEKJEN NO. 28 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK**

## **RUANG LINGKUP STANDAR PELAYANAN:**

- a. Konsultasi;**
- b. Kunjungan dan audiensi ke Mahkamah Konstitusi;**
- c. Pengaduan masyarakat;**
- d. Permohonan magang KKN/KKL;**
- e. Permohonan informasi dan dokumentasi;**
- f. Peliputan ke Mahkamah Konstitusi;**
- g. Kerja sama perguruan tinggi;**
- h. Pengajuan permohonan, jawaban, dan penyampaian keterangan;**
- i. Persidangan;**
- j. Risalah; dan**
- k. Putusan.**



# CONTOH STANDAR PELAYANAN PUBLIK MK PUBLIK

## STANDAR PELAYANAN KONSULTASI PERKARA

### 1 PERSYARATAN LAYANAN

Pemohon mengajukan konsultasi perihal prosedur beracara di Mahkamah Konstitusi.

### 2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

Pemberian Layanan Konsultasi dibagi menjadi 5 kegiatan:  
a. Pemohon konsultasi mengisi Formulir Konsultasi;  
b. Pelaksana memberikan layanan konsultasi;  
c. Konsultasi diinput ke dalam SIMPP;  
d. Merekapitulasi konsultasi ke dalam ms. excel;  
e. Formulir Konsultasi diarsipkan.

### 3 JANGKA PENYELESAIAN

10 - 30 menit.



### 4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



### 5 PRODUK LAYANAN

a. Formulir Konsultasi terisi.  
b. Konsultasi diupload dalam SIMPP



### 6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

a. Lemari penyimpanan berkas;  
b. Meja Permohonan;  
c. Komputer;  
d. Printer;  
e. Stempel.



### KOMPETENSI PELAKSANA

a. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi;  
b. Pelaksana memiliki pengetahuan seputar hukum acara di Mahkamah Konstitusi;  
c. Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan konsultasi.

### PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan  
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan  
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan  
4. Panitera Muda I

### PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

a. Melalui kotak saran;  
b. Melalui laman MK.

### 10 JUMLAH PELAKSANA

4 orang

### JAMINAN PELAYANAN

Pemuatan formulir konsultasi ke dalam SIMPP.

### 12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya  
2. Bebas KKN

### MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

### 15 WAKTU PELAYANAN

Senin - Kamis : 08.30 - 16.00  
(di luar jam istirahat pukul 12.00 - 13.00)  
Jumat : 08.30 - 16.00  
(di luar jam istirahat pukul 11.30 - 13.00)



### EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali  
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali



## STANDAR PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

### 1 PERSYARATAN PELAYANAN

Mengajukan pengaduan baik secara langsung maupun tidak langsung (secara elektronik/melalui laman Mahkamah Konstitusi)



### 7 KOMPETENSI PELAKSANA

1. Memahami mekanisme, prosedur, dan cara kerja lembaga.  
2. Bisa memegang rahasia.

### 2 SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. Pengaduan secara langsung disampaikan kepada Tim Penanganan Pengaduan pada Inspektorat Mahkamah Konstitusi.  
2. Pengaduan secara tidak langsung disampaikan melalui:  
a. Kotak saran;  
b. Kotak pos;  
c. Pesan singkat elektronik (SMS);  
d. Surat elektronik (email);  
e. Telepon atau fax; dan/atau  
f. Media sosial.  
3. Pengaduan tersebut paling tidak memuat:  
a. Identitas pelapor;  
b. Identitas terlapor;  
c. Waktu, tempat, kronologis kejadian; dan  
d. Pihak yang terlibat;  
e. Serta dilengkapi dengan dokumen dan bukti pendukung lainnya.

### 3 JANGKA PENYELESAIAN

1. Tanggapan pengaduan maksimal 14 (empat belas) hari setelah pengaduan diterima.  
2. Jika materi pengaduan tidak lengkap, pelapor melengkapi aduannya maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak menerima tanggapan pengaduan. Pengaduan harus diselesaikan maksimal 60 (enam puluh) hari kerja sejak pengaduan dinyatakan lengkap.



### 5 PRODUK PELAYANAN

Penanganan Pengaduan

### 4 BIAYA TARIF

Tidak dikenakan biaya.

### 6 SARANA, PRASARANA/FASILITAS

1. Buku Register Pengaduan atau e-register  
2. Komputer  
3. Telepon

### 8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Inspektur.  
2. Koordinator Pengawas Kinerja.

### 9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Ditangani langsung oleh atasan petugas secara berjenjang.

### 10 JUMLAH PELAKSANA

3 orang.

### 11 JAMINAN PELAYANAN

1. Diajukan tanpa dikenakan biaya.  
2. Tolak Gratifikasi.  
3. Bebas KKN.  
4. Identitas pengadu dijamin kerahasiannya.

### 12 JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

1. Diajukan tanpa dikenakan biaya.  
2. Bebas KKN.  
3. Jika diperlukan identitas pengadu dijamin kerahasiannya.

### 13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Evaluasi dilaksanakan berkala

### 14 MASA BERLAKU IJIN


Tidak ada.

### 15 WAKTU PELAYANAN

Senin - Kamis :  
08.30 - 16.00 (di luar jam istirahat  
pukul 12.00 - 13.00)

Jumat :  
08.30 - 16.00 (di luar jam istirahat  
pukul 11.30 - 13.00)





*“The goal as a **company** is to have customer **service** that is not just the best, but **legendary**”*

Sam Walton



*“People expect good service but few are willing to give it.”*

Robert Gately





# PELAYANAN PUBLIK MK



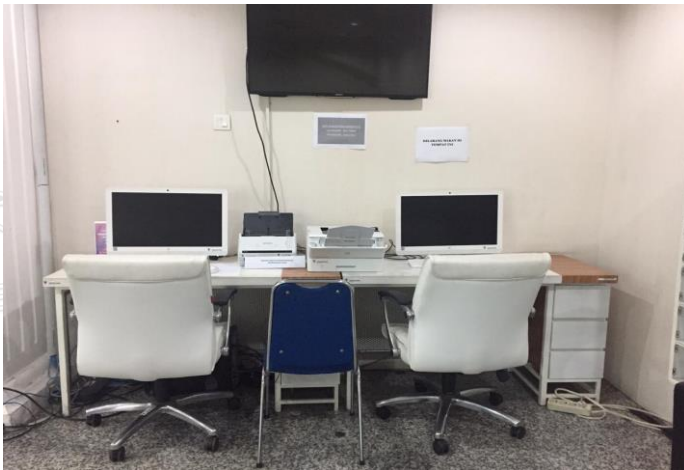
**Penerimaan Permohonan**



**Mesin NUP**



**Pelayanan Informasi dan Dokumentasi**



**Pojok Digital**



**Ruang Tunggu Permohonan**



**Ruang Sidang Pleno**





**COMMUNI-  
CATION**

**INFORMATION**

**TECHNOLOGY**

**ICT**

**INTEGRITY**

**TRUST-  
WORTHY**

**CLEAN**

# PENGEMBANGAN E-COURT MAHKAMAH KONSTITUSI

i<sup>5</sup> Judiciary

ADMINISTRASI PERADILAN

PELAKSANAAN  
WEWENANG  
DAN KEWAJIBAN  
MK

PERMOHONAN ONLINE

Risalah (Text, Audio, Video)

Click MK (Mobile App)

E-BRPK

Jadwal Sidang

Seat Reservation

SIMPP

Case Retrival

Live Streaming

E-MINUTASI

Case Tracking

Anotasi

VIDEO CONFERENCE

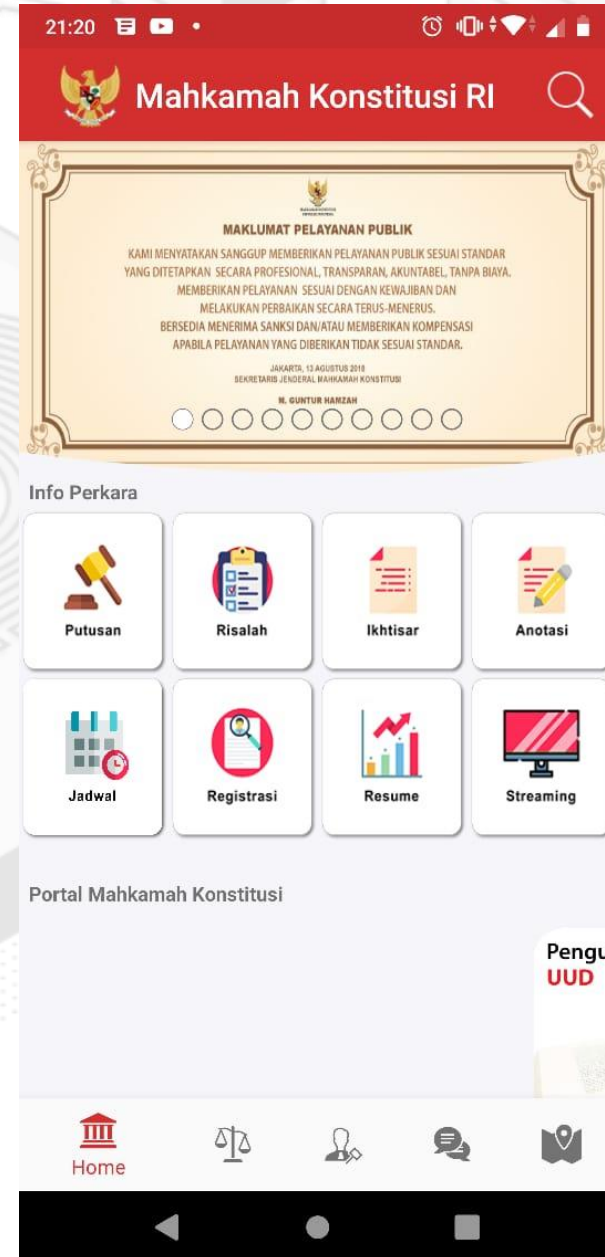
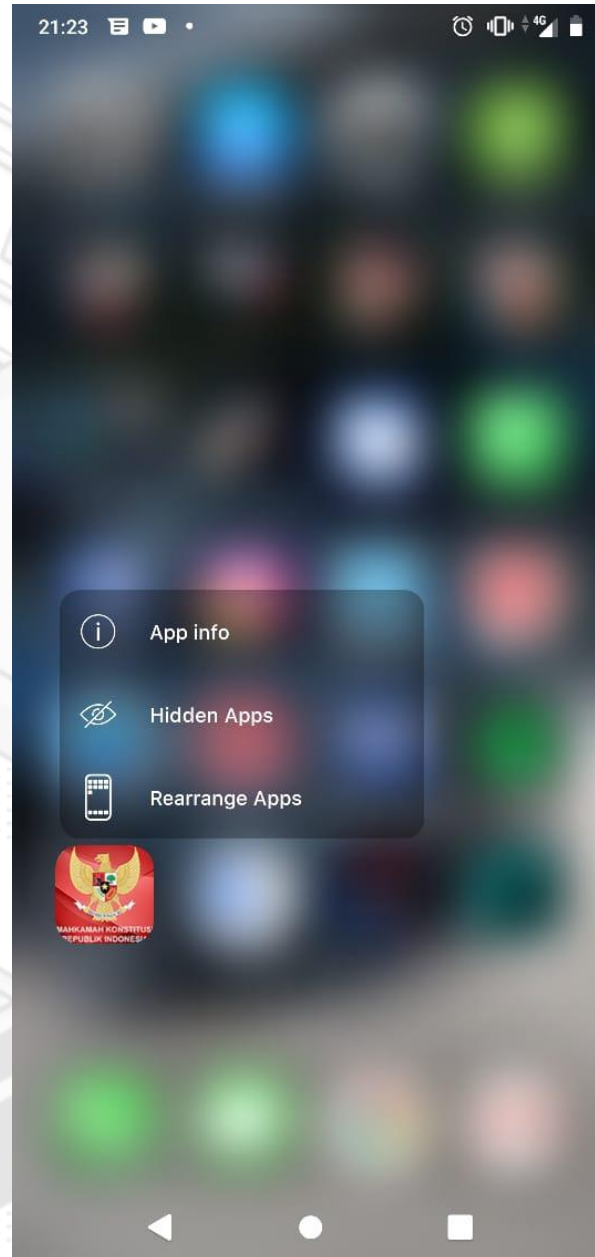
Putusan

Visit MK

MK MODERN  
DAN TERPERCAYA

# CLICK MK

- Click MK adalah konten website MK versi smartphone. Adapun fitur di dalamnya berupa: informasi persidangan (jadwal sidang, risalah, putusan), profil MK, persidangan jarak jauh, live streaming, berita, dan pengumuman.
- Click MK dapat diinstal melalui Playstore (Android) dan Appstore (iOS/Apple).
- Ke depan, Click MK akan disempurnakan. SIMPEL dan Tracking Perkara akan menjadi fitur di dalamnya, serta mendesain ulang tampilan (user interface) agar masyarakat lebih mudah mengakses fitur.





# SIMPEL

← → ↻ ⓘ Not secure | simpel.mkri.id



 [Mahkamah Konstitusi RI](#) [Tentang Simpel](#) [Panduan Aplikasi](#) [Kontak](#) [FAQ](#)

[Sign Up](#) [Login](#)

*simpel.mkri.id*  
Sistem Informasi Permohonan Elektronik

Alamat Email

contoh : dilan@gmail.com


Password

Login

[Pendaftaran Login Baru](#)  
[Lupa Password](#)  
[Dokumen Yang Perlu Disiapkan](#)



# SIMPEL (2)

**SIMPEL**☰ Noto Abdullah  
User  
Image  
Dashboard

**Noto Abdullah**

Dashboard  
PUU <  
SKLN <  
PHPU <  
PHP Kada <  
Kunjungan Sidang <  
Bantuan <

Rabu, 16 Oktober 2019

**15:17:54**

### SIMPEL.MKRI.ID

SIMPEL.MKRI.ID

#### Permohonan

<b>3</b> Pengujian Undang-Undang (PUU) <a>Selengkapnya</a>	<b>3</b> Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) <a>Selengkapnya</a>	<b>0</b> Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden/Wakil Presiden <a>Selengkapnya</a>	<b>0</b> Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif (DPD) <a>Selengkapnya</a>
--	--	---	--

#### Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

<b>0</b> Perkara Walikota/Wakil Walikota <a>Selengkapnya</a>	<b>0</b> Perkara Bupati/Wakil Bupati <a>Selengkapnya</a>	<b>0</b> Perkara Gubernur/Wakil Gubernur <a>Selengkapnya</a>
--	--	--

#### Kalender Sidang

Prev 2019 Oktober Next

<https://simpel-test.mkri.id/umum/info/puu>

### Apa itu SIMPEL?

Aplikasi berbasis web yang memberikan akses langsung kepada para pihak terhadap perkara konstitusi, termasuk untuk mengajukan permohonan elektronik secara online (Permohonan Online)

### Manfaat SIMPEL

- Masyarakat dapat mendaftarkan diri dalam mengajukan permohonan secara online
- Memantau perkembangan permohonan/perkara
- Mengakses jadwal sidang
- Mengakses list panggilan sidang
- Mengunduh risalah atau putusan

### Fitur SIMPEL

- Permohonan Pemohon Online
- Keterangan Pihak Terkait
- Tracking Perkara
- Jawaban Termohon



### Alur Registrasi SIMPEL



### Modul Permohonan Pemohon



### Modul Pihak Terkait



# CASE TRACKING (1)

Beranda | Mahkamah Konstitusi

https://mkri.id


BERANDA PERADILAN HAKIM PERKARA PERATURAN ADMINISTRASI UMUM

**PUTUSAN** RISALAH IKHTISAR ANOTASI

Rabu, 30 Januari 2019 | 15:06 WIB  
Nomor Perkara : 90/PUU-XVI/2018  
Amar Putusan : Menolak Permohonan Pemohon ...  
Pemasyarakatan

Rabu, 30 Januari 2019 | 15:22 WIB  
Nomor Perkara : 95/PUU-XVI/2018  
Amar Putusan : Menolak Permohonan Para ...  
Mahkamah Agung

Selengkapnya



**PENGUMUMAN** : Jabatan Panitera Di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2018 :: Informasi/Data yang tersedia di laman (website) Mahkamah

**JADWAL SIDANG** Selengkapnya >

2019 Februari


Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

**BERITA** INFO PUBLIK PUBLIKASI


Jum'at, 01 Februari 2019 | 13:50 WIB  
Aturan Batas Waktu Memori Kasasi Konstitusional  
Mahkamah Konstitusi (Mk) Menolak Permohonan Uji Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Jum'at, 01 Februari 2019 | 11:13 WIB  
Wakil Ketua MK Tutup Bimtek Penyelesaian Perkara Pemilu 2019 Bagi Nasdem  
Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Acara Perkara


**PEMILIHAN UMUM 2019** **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**




Hakim Konstitusi






Putusan



Simpel.mkri.id




Case Tracking  
Penelusuran Perkara





# CASE TRACKING (2)

Search Engine - MKRI x +  
https://search.mkri.id

   **CASE TRACKING**

**MKRI** **PUU** **SKLN** **PHPU** **PHPKADA**

**Jenis dokumen**

<input type="radio"/> Putusan	2.948
<input type="radio"/> Anotasi	58
<input type="radio"/> Ikhtisar Putusan	245
<input type="radio"/> Risalah Persidangan	9.354

**Jenis perkara**

<input type="checkbox"/> Semua jenis perkara	
<input type="checkbox"/> PUU	6.555
<input type="checkbox"/> SKLN	125
<input type="checkbox"/> PHPU	622
<input type="checkbox"/> PHPU.A	66
<input type="checkbox"/> PHPU.C	75
<input type="checkbox"/> PHPU.C1	23
<input type="checkbox"/> PHPU.D	4.046

**Amar putusan**

<input type="checkbox"/> Semua amar putusan	
<input type="checkbox"/> Tidak dapat diterima	876
<input type="checkbox"/> Dikabulkan	149
<input type="checkbox"/> Dikabulkan sebagian	278
<input type="checkbox"/> Ditolak	1.281
<input type="checkbox"/> Ketetapan	00

Relevan ▾

98/PUU-XVI/2018 Putusan  
**Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi**  
Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.  
Tanggal diucapkan: 30 Januari 2019

95/PUU-XVI/2018 Putusan  
**Mahkamah Agung**  
Amar putusan: MENOLAK PERMOHONAN PARA PEMOHON UNTUK SELURUHNYA.  
Tanggal diucapkan: 30 Januari 2019

90/PUU-XVI/2018 Putusan  
**Pemasyarakatan**  
Amar putusan: MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA.  
Tanggal diucapkan: 30 Januari 2019



## PENELUSURAN PERKARA



## MAHKAMAH KONSTITUSI

### Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



PROSES

# JADWAL SIDANG

## JADWAL SIDANG

Selengkapnya >

Prev

2019 November

Next

Sen Sel Rab Kam **Jum** **Sab** Ming

28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11 4	12 4	13 4	14	15	16	17
18 2	19 5	20 3	21	22	23	24
25 2	26 2	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8

Sidang
  Putusan
  Keduanya
 L Libur

Selasa 19 November 2019, 11:00 WIB	59/PUU- XVII/2019	Nomor .. Tahun ... tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945	Sholikhah, S.H., Agus Cholik, S.H., Wiwin Taswin, S.H., dkk		Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)  (Panel 0)	Daftar Hadir
Selasa 19 November 2019, 13:00 WIB	69/PUU- XVII/2019	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Erko Mojra	-	Pemeriksaan Pendahuluan (I)  (Panel 0)	Daftar Hadir
Selasa 19 November 2019, 14:00 WIB	70/PUU- XVII/2019	Permohonan Pengujian Formil dan Materil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., Eko Riyadi, S.H., M.H., Ari Wibowo, S.H., S.HL., M.H., dan Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.	Anang Zubaidy, S.H., M.H., dkk.	Pemeriksaan Pendahuluan (I)  (Panel 0)	Daftar Hadir
	71/PUU- XVII/2019	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Zico Leonard Djagardo Simanjuntak	-		
	73/PUU- XVII/2019	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Ricki Martin Sidauruk			

**PUTUSAN**

**RISALAH**

**IKHTISAR**

**ANOTASI**

Rabu, 23 Oktober 2019 | 10:00 WIB

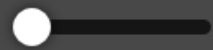
Nomor Perkara : 251-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Acara Sidang : Pengucapan Putusan

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Dpr-Dprd Provinsi Jawa Barat (Jabar) Tahun 2019



File PDF |



0:00



Senin, 07 Oktober 2019 | 14:00 WIB

Nomor Perkara : 251-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Acara Sidang : Mendengar Saksi ...

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Dpr-Dprd Provinsi Jawa Barat (Jabar) Tahun 2019



File PDF |



0:00:00



Selengkapnya

# PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

CARI



3144

Putusan



FusionCharts XT Trial



1275

Putusan PUU



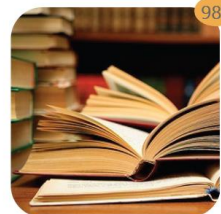
25

Putusan SKLN



1557

Putusan PHPU



982

Putusan PHPKADA

BERANDA > INFORMASI PERSIDANGAN > PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

## PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK ([www.mkri.id](http://www.mkri.id)) dan dapat diakses oleh masyarakat.

Nomor  Cari

**23 Oct 2019**  
12:46 WIB

Nomor : 52/PUU-XVII/2019  
Pokok Perkara : pengangkatan calon anggota dpr  
Pemohon : Alamsyah Panggabean  
Amar Putusan : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.  
Status : Tidak Dapat Diterima  
Di Unduh : 747  
Kata Kunci : pengangkatan calon anggota dpr  
File Pendukung : [Klik Disini](#)

**23 Oct 2019**  
12:33 WIB

Nomor : 47/PUU-XVII/2019  
Pokok Perkara : Pemilihan Umum  
Pemohon : 1. Syamsul Bachri Marasabessy; 2. Yoyo Effendi; 3. Djefri Tuanany; 4. Adi Sucipto; dan 5. Sulastri  
Amar Putusan : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.  
Status : Menolak Seluruhnya  
Di Unduh : 598  
Kata Kunci : Pemilihan Umum  
File Pendukung : [Klik Disini](#)



# ANOTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

**PUTUSAN**

**RISALAH**

**IKHTISAR**

**ANOTASI**

2017-12-18 | 22:00:41 WIB

Nomor Perkara : Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

2018-03-19 | 13:27:13 WIB

Nomor Perkara : Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Selengkapnya

## ANOTASI

Jumlah Anotasi : 58

Nama Undang-undang

Cari

### Judul



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN

[Pengaturan Pengguna](#)[Data Berkas Permohonan](#)[Data Berkas Perkara](#)[Laporan](#)[Logout \(raka\) Administrator](#)

### Perkara Registrasi

No. Permohonan	Judul Perkara	Pemohon	Tanggal Penerimaan	Aksi
1775/PAN.MK/IV/2018	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Martinus Butarbutar, S.H. dan Risof Mario, S.H.		<a href="#">berkas</a>   <a href="#">delete</a>

BUKU REGISTRASI PERKARA KONSTITUSI  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2018

NO.	PENERIMAAN PERMOHONAN / JAWABAN / KETERANGAN	NOMOR PERKARA (REGISTRASI)	PEMOHON	TERMCHON	PIHAH TERKAIT	POKOK PERKARA	PETITUM	KETETAPAN	PENYAMPAJAN SALINAN PERMOHONAN	PANGGILAN SIDANG Kepada:	PERSIDANGAN	PEMOHON																																																																																																																																								
								I. PANEL HAKIM II. PP III. HARI SIDANG a. HARI, Tanggal	Kepada: Nomor: a. Hari, Tanggal b. Pukul	Nomor: a. Hari, Tanggal b. Pukul c. Acara	a. Hari, Tanggal b. Pukul c. Acara																																																																																																																																									
1	<p>a. Kamis, 05 Juli 2018 b. 10:14 WIB c. <a href="#">Permohonan Pemohon</a> d. <a href="#">APPP dan DKPP APL dan DPKP2</a></p> <p>a. Selasa, 31 Juli 2018 b. 09:50 WIB c. <a href="#">Jawaban Termohon</a> d. <a href="#">APJT</a></p> <p>a. Selasa, 31 Juli 2018 b. 08:56 WIB c. <a href="#">Keterangan Pihak Terkait</a> d. <a href="#">APKPT</a></p>	<p>a. <a href="#">1/PH/PT/KOT-XVI/2018</a> b. Senin, 23 Juli 2018 c. 09:00 WIB d. <a href="#">Permohonan diregistrasi</a></p>	<p>K.H. Habib Ali Zaenal Abidin, S.E. dan Tanti Prasetyoningrum Kuasa: Aji Nurdin, S.H., S.T. Petrus Bala Palyona, S.H., M.H., CL.A., F.A. Fredyanto Hascaryo, S.H., M.H., dkk</p>	<p>KPU Tegal Kuasa: Aji Nurdin, S.H., S.T.</p>	<p>H. Dedy Yon Supriyono, S.E., M.M. dan Muhammad Jumadi, S.T., M.M. Kuasa: R.A. Made Damayanti Zaelva, S.H., dkk</p>	<p><a href="#">Perselelahan Hasil Pemilihan Walikota Tegal Tahun 2018</a></p>	<p>1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018 telah terjadi pelanggaran secara Terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan KPU KOTA TEGAL sebagai penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018; 3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor: 20/ PL.03.6-Kpt/3376/KPU-Kot/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018 tanggal 4 Juli 2018; 4. Memerintahkan KPU KOTA TEGAL untuk melakukan pemugutan suara ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018 di TPS berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>NO TPS</th> <th>KEC. LURAHAN</th> <th>KECAMATAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>TPS 1</td><td>Panggung</td><td>tegal Timur</td></tr> <tr><td>2</td><td>TPS 2</td><td>Panggung</td><td>tegal Timur</td></tr> <tr><td>3</td><td>TPS 3</td><td>Muarareja</td><td>tegal Barat</td></tr> <tr><td>4</td><td>TPS 4</td><td>Muarareja</td><td>tegal Barat</td></tr> <tr><td>5</td><td>TPS 19</td><td>Panggung</td><td>tegal Timur</td></tr> <tr><td>6</td><td>TPS 3</td><td>Kejambon</td><td>tegal Timur</td></tr> <tr><td>7</td><td>TPS 1</td><td>Kejambon</td><td>tegal Timur</td></tr> <tr><td>8</td><td>TPS 4</td><td>Kejambon</td><td>tegal Timur</td></tr> <tr><td>9</td><td>TPS 15</td><td>Mintaragan</td><td>tegal Timur</td></tr> <tr><td>10</td><td>TPS 37</td><td>Panggung</td><td>tegal Timur</td></tr> <tr><td>11</td><td>TPS 24</td><td>Sierok</td><td>tegal Timur</td></tr> <tr><td>12</td><td>TPS 2</td><td>Pesurungan Lor</td><td>Margadana</td></tr> <tr><td>13</td><td>TPS 7</td><td>Kalinyamat Kulon</td><td>Margadana</td></tr> <tr><td>14</td><td>TPS 7</td><td>Cabewan</td><td>Margadana</td></tr> <tr><td>15</td><td>TPS 7</td><td>Krandon</td><td>Margadana</td></tr> <tr><td>16</td><td>TPS 4</td><td>Kaligangsa</td><td>Margadana</td></tr> <tr><td>17</td><td>TPS 9</td><td>Kaligangsa</td><td>Margadana</td></tr> <tr><td>18</td><td>TPS 12</td><td>Randugunting</td><td>tegal Selatan</td></tr> <tr><td>19</td><td>TPS 1</td><td>Kraton</td><td>tegal Barat</td></tr> <tr><td>20</td><td>TPS 6</td><td>Kraton</td><td>tegal Barat</td></tr> <tr><td>21</td><td>TPS 20</td><td>Tegalsari</td><td>tegal Barat</td></tr> <tr><td>22</td><td>TPS 1</td><td>Tegalsari</td><td>tegal Barat</td></tr> <tr><td>23</td><td>TPS 4</td><td>Muarareja</td><td>tegal Barat</td></tr> <tr><td>24</td><td>TPS 1</td><td>Pekauman</td><td>tegal Barat</td></tr> <tr><td>25</td><td>TPS 5</td><td>Pesurungan Kidul</td><td>tegal Barat</td></tr> <tr><td>26</td><td>TPS 7</td><td>Pesurungan Lor</td><td>Margadana</td></tr> <tr><td>27</td><td>TPS 7</td><td>Kalinyamat Kulon</td><td>Margadana</td></tr> <tr><td>28</td><td>TPS 1</td><td>Pesurungan Lor</td><td>Margadana</td></tr> <tr><td>29</td><td>TPS 22</td><td>Sierok</td><td>tegal Timur</td></tr> <tr><td>30</td><td>TPS 26</td><td>Sierok</td><td>tegal Timur</td></tr> <tr><td>31</td><td>TPS 5</td><td>Pesurungan Lor</td><td>Margadana</td></tr> <tr><td>32</td><td>TPS 18</td><td>Margadana</td><td>Margadana</td></tr> <tr><td>33</td><td>TPS 2</td><td>Krandon</td><td>Margadana</td></tr> </tbody> </table>	No.	NO TPS	KEC. LURAHAN	KECAMATAN	1	TPS 1	Panggung	tegal Timur	2	TPS 2	Panggung	tegal Timur	3	TPS 3	Muarareja	tegal Barat	4	TPS 4	Muarareja	tegal Barat	5	TPS 19	Panggung	tegal Timur	6	TPS 3	Kejambon	tegal Timur	7	TPS 1	Kejambon	tegal Timur	8	TPS 4	Kejambon	tegal Timur	9	TPS 15	Mintaragan	tegal Timur	10	TPS 37	Panggung	tegal Timur	11	TPS 24	Sierok	tegal Timur	12	TPS 2	Pesurungan Lor	Margadana	13	TPS 7	Kalinyamat Kulon	Margadana	14	TPS 7	Cabewan	Margadana	15	TPS 7	Krandon	Margadana	16	TPS 4	Kaligangsa	Margadana	17	TPS 9	Kaligangsa	Margadana	18	TPS 12	Randugunting	tegal Selatan	19	TPS 1	Kraton	tegal Barat	20	TPS 6	Kraton	tegal Barat	21	TPS 20	Tegalsari	tegal Barat	22	TPS 1	Tegalsari	tegal Barat	23	TPS 4	Muarareja	tegal Barat	24	TPS 1	Pekauman	tegal Barat	25	TPS 5	Pesurungan Kidul	tegal Barat	26	TPS 7	Pesurungan Lor	Margadana	27	TPS 7	Kalinyamat Kulon	Margadana	28	TPS 1	Pesurungan Lor	Margadana	29	TPS 22	Sierok	tegal Timur	30	TPS 26	Sierok	tegal Timur	31	TPS 5	Pesurungan Lor	Margadana	32	TPS 18	Margadana	Margadana	33	TPS 2	Krandon	Margadana	<p>I. PANEL HAKIM <a href="#">1/TAP/MK/2018</a> 1. Aswanto 2. Saldi Iera 3. Manahan MP Silompul</p> <p>II. PANITERA PENGGANTI <a href="#">1/PAN.MK/2018</a> 1. Ery Satria Pamungkas</p> <p>III. HARI SIDANG <a href="#">34/TAP.MK/2018</a> a. Senin, 23 Juli 2018</p>	<p>TERMOHON <a href="#">1.1/PAN.MK/7/2018</a> a. Senin, 23 Juli 2018 b. 15:35 WIB</p> <p>PIHAH TERKAIT <a href="#">1.1/PAN.MK/7/2018</a> a. Senin, 23 Juli 2018 b. 15:35 WIB</p>	<p>PEMOHON <a href="#">74.1/PAN.MK/7/2018</a> a. Selasa, 24 Juli 2018 b. 08:00 WIB c. Pendahuluan</p> <p>TERMOHON <a href="#">74.1/PAN.MK/7/2018</a> a. Selasa, 24 Juli 2018 b. 08:00 WIB c. Pendahuluan</p> <p>PIHAH TERKAIT <a href="#">74.1/PAN.MK/7/2018</a> a. Selasa, 24 Juli 2018 b. 08:00 WIB c. Pendahuluan</p> <p>BAWASLU <a href="#">74.1/PAN.MK/7/2018</a> a. Selasa, 24 Juli 2018 b. 08:00 WIB c. Pendahuluan</p> <p>PEMOHON <a href="#">243.1/PAN.MK/7/2018</a> a. Jumat, 27 Juli 2018 b. 08:00 WIB c. Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu/Panwas dan Pengesahan Alat Bukti (II)</p> <p>TERMOHON <a href="#">243.1/PAN.MK/7/2018</a> a. Jumat, 27 Juli 2018 b. 08:00 WIB c. Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu/Panwas dan Pengesahan Alat Bukti (II)</p> <p>PIHAH TERKAIT <a href="#">243.1/PAN.MK/7/2018</a> a. Jumat, 27 Juli 2018 b. 08:00 WIB c. Mendengarkan Jawaban Termohon.</p>	<p>a. <a href="#">Jum'at, 27 Juli 2018</a> b. 08:30 WIB c. <a href="#">Pemeriksaan pendahuluan</a></p> <p>a. <a href="#">Rabu, 01 Agustus 2018</a> b. 13:00 WIB c. <a href="#">Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu/Panwas dan Pengesahan Alat Bukti (II)</a></p> <p>a. <a href="#">Selasa, 28 Agustus 2018</a> b. 09:00 WIB c. <a href="#">Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli Pemohon, Keterangan Pihak Terkait (III)</a></p> <p>a. <a href="#">Senin, 17 Desember 2018</a> b. 11:00 WIB c. <a href="#">Pengucapan Putusan</a></p>	<p>Flashdisk ket : Daftar Bukti, Surat Permohonan, Tabel Lampiran, Foto-foto dan Video (10 July 2018 - 19.59 WIB) (Tambahkan ke 1)</p> <p>Surat Permohonan Revisi Tanda Tangan Lembaran ket : 1 Asli dan Leges, 3 Fotocopy (10 July 2018 - 19.59 WIB) (Tambahkan ke 1)</p> <p>Keputusan Termohon (KPU) ket : 1 Asli (Sudah di Leges), 3 FotoCopy, Termasuk di dalam Bukti P-5 (19 July 2018 - 19.59 WIB) (Tambahkan ke 1)</p> <p>Alat/Dokumen Bukti ket : P-1 s.d P-35, 1 Asli (Sudah di Leges dan di Kuping), 3 Fotocopy (10 July 2018 - 19.59 WIB) (Tambahkan ke 1)</p> <p>Daftar Alat/Dokumen Bukti ket : 1 Asli (Tanda-tanda Asli dan Sudah Leges), 3 Fotocopy (10 July 2018 - 19.59 WIB) (Tambahkan ke 1)</p> <p>Surat Kuasa - Perbaikan ket : 1 Asli (Sudah di Leges, Tanda tangan Lembaran), 3 Fotocopy (10 July 2018 - 19.59 WIB) (Tambahkan ke 1)</p> <p>Kartu Tanda Advokat ket : 10 Advokat, 4 Rangkap Fotocopy (11 July 2018 - 21.25 WIB) (Tambahkan ke 2)</p> <p>Daftar Bukti Tambahan P-36 s.d P-39 ket : 1 asli <del>td</del> lengkap, 3 copy <del>td</del> belum lengkap (19 July 2018 - 16.40 WIB) (Tambahkan ke 3)</p> <p>Bukti Tambahan P-35 s.d P-39 ket : 1 asli materi leges, 3 copy (19 July 2018 - 16.40 WIB) (Tambahkan ke 3)</p> <p>Flashdisk ket : file daftar bukti tambahan (19 July 2018 - 16.40 WIB) (Tambahkan ke 3)</p> <p>Daftar Alat Bukti (Tambahkan</p>
No.	NO TPS	KEC. LURAHAN	KECAMATAN																																																																																																																																																	
1	TPS 1	Panggung	tegal Timur																																																																																																																																																	
2	TPS 2	Panggung	tegal Timur																																																																																																																																																	
3	TPS 3	Muarareja	tegal Barat																																																																																																																																																	
4	TPS 4	Muarareja	tegal Barat																																																																																																																																																	
5	TPS 19	Panggung	tegal Timur																																																																																																																																																	
6	TPS 3	Kejambon	tegal Timur																																																																																																																																																	
7	TPS 1	Kejambon	tegal Timur																																																																																																																																																	
8	TPS 4	Kejambon	tegal Timur																																																																																																																																																	
9	TPS 15	Mintaragan	tegal Timur																																																																																																																																																	
10	TPS 37	Panggung	tegal Timur																																																																																																																																																	
11	TPS 24	Sierok	tegal Timur																																																																																																																																																	
12	TPS 2	Pesurungan Lor	Margadana																																																																																																																																																	
13	TPS 7	Kalinyamat Kulon	Margadana																																																																																																																																																	
14	TPS 7	Cabewan	Margadana																																																																																																																																																	
15	TPS 7	Krandon	Margadana																																																																																																																																																	
16	TPS 4	Kaligangsa	Margadana																																																																																																																																																	
17	TPS 9	Kaligangsa	Margadana																																																																																																																																																	
18	TPS 12	Randugunting	tegal Selatan																																																																																																																																																	
19	TPS 1	Kraton	tegal Barat																																																																																																																																																	
20	TPS 6	Kraton	tegal Barat																																																																																																																																																	
21	TPS 20	Tegalsari	tegal Barat																																																																																																																																																	
22	TPS 1	Tegalsari	tegal Barat																																																																																																																																																	
23	TPS 4	Muarareja	tegal Barat																																																																																																																																																	
24	TPS 1	Pekauman	tegal Barat																																																																																																																																																	
25	TPS 5	Pesurungan Kidul	tegal Barat																																																																																																																																																	
26	TPS 7	Pesurungan Lor	Margadana																																																																																																																																																	
27	TPS 7	Kalinyamat Kulon	Margadana																																																																																																																																																	
28	TPS 1	Pesurungan Lor	Margadana																																																																																																																																																	
29	TPS 22	Sierok	tegal Timur																																																																																																																																																	
30	TPS 26	Sierok	tegal Timur																																																																																																																																																	
31	TPS 5	Pesurungan Lor	Margadana																																																																																																																																																	
32	TPS 18	Margadana	Margadana																																																																																																																																																	
33	TPS 2	Krandon	Margadana																																																																																																																																																	





Selamat Mengunjungi Laman Konstitusi



Puskon



Magang dan KKN/KKL



Permohonan Kerjasama



Audiensi



Menghadiri Sidang



Permohonan BIMTEK



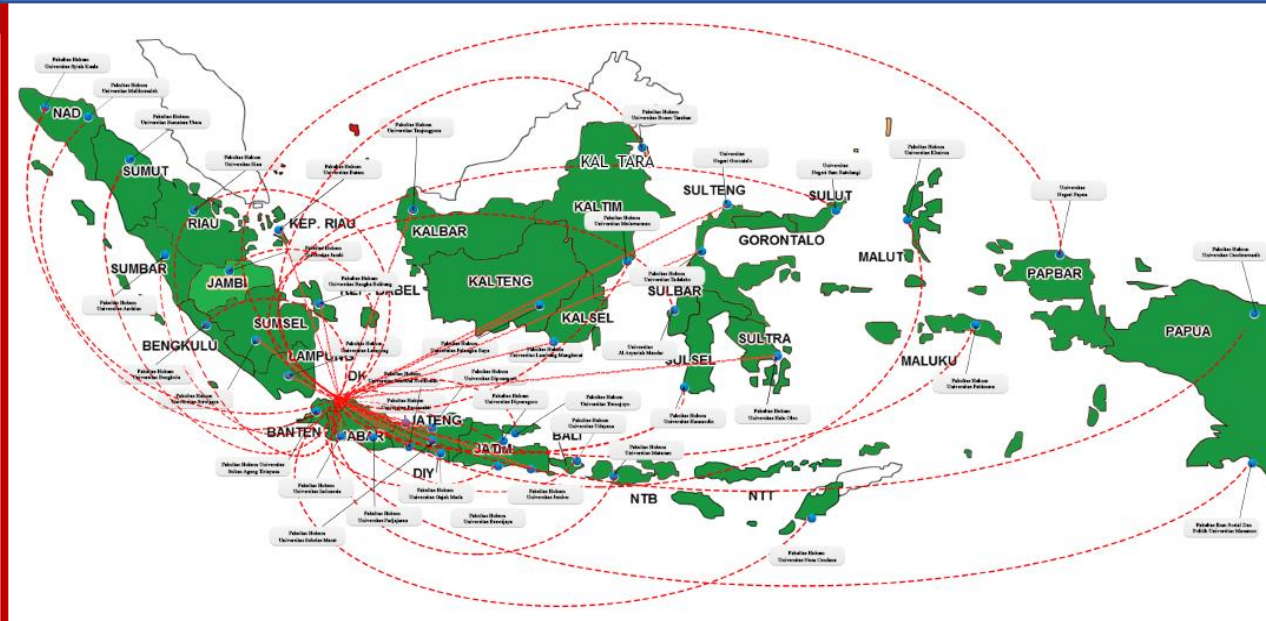
Konsultasi



Studi



# LIVE STREAMING DAN LAYANAN PERSIDANGAN JARAK JAUH (VIDEO CONFERENCE) (1)



Untuk kepentingan pemeriksaan perkara, Mahkamah dapat menyelenggarakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh dengan menggunakan teknologi *video conference*.



Informasi Tambahan:

- ✓ Pemberitahuan untuk melakukan persidangan jarak jauh 2 hari sebelum sidang;
- ✓ Juru sumpah dari pengelola Vicon di masing-masing kampus;
- ✓ Melibatkan pengamanan dari kepolisian setempat dan/atau petugas keamanan kampus.

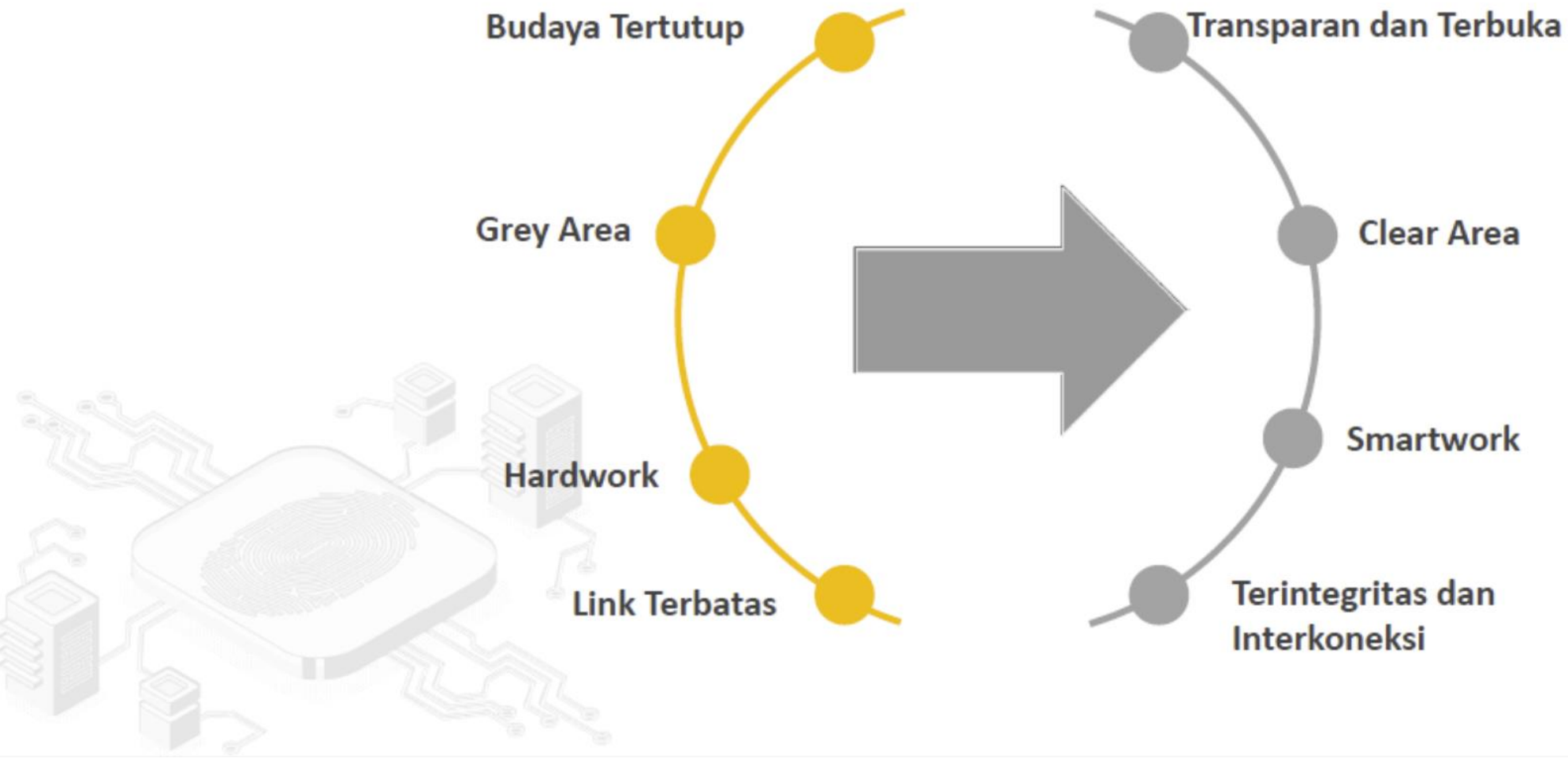
# LIVE STREAMING DAN LAYANAN PERSIDANGAN JARAK JAUH (VIDEO CONFERENCE) (2)



TILAH LOMBA FESTIVAL KONSTITUSI "SHORT MOVIE KONSTITUSI" DENGAN TEMA "LANDMARK DECISIONS M 6



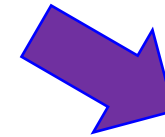
# IMPLIKASI PENGGUNA ICT



# MAHKAMAH KONSTITUSI DI ERA 4.0

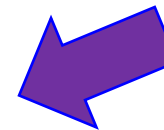


Memanfaatkan  
AI (Artificial  
Intelligence)



Pengolah Data  
Perkara

Machine  
Learning & Law



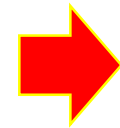


# MAHKAMAH KONSTITUSI DI ERA 4.0

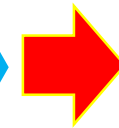
**Mengapa  
Machine  
Learning?**

Tujuan utama Machine Learning : untuk menganalisis data masa lalu guna mengembangkan rule/aturan yang dapat digeneralisasikan ke depan.

Human cognitive  
ability + machine  
learning support



- Automation
- Predictive Analysis
- Data Analytic



- Increasing efficiency
- Increasing fairness  
of law

# PENGHARGAAN YANG DITERIMA DARI MURI



Rekor MURI Sidang Peradilan Non-stop Terlama




Rekor MURI Sidang Peradilan dengan Berkas Terbanyak

Rekor Proses Peradilan Paling Transparan



# PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK di MK

 2352-9000

Jl. Medan Merdeka Barat No.6. Jakarta Pusat 10110  
Fax: 021-3520177. Email: office@mkri.id

TANYA JAWAB



DEWAN ETIK



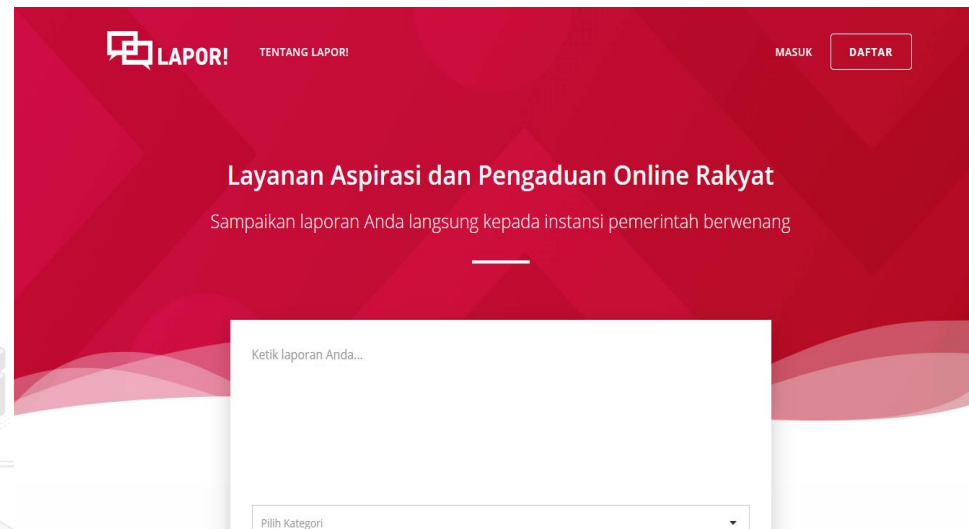
HUBUNGI MK



WHISTLEBLOWING



## 1. Laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id)



The screenshot shows the homepage of the LAPOR! website. At the top left is the LAPOR! logo and the text 'TENTANG LAPOR!'. At the top right are 'MASUK' and 'DAFTAR' buttons. The main heading is 'Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat' with the subtext 'Sampaikan laporan Anda langsung kepada instansi pemerintah berwenang'. Below this is a form with a text input field labeled 'Ketik laporan Anda...' and a dropdown menu labeled 'Pilih Kategori'.

## 2. Laman [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)



## 3. Kotak Pengaduan Pelayanan Publik MK

**Sekian  
&  
Terima Kasih**

